

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awalnya Serbia sendiri merupakan kerajaan yang berdiri di bawah pengaruh Byzantium. Serbia sendiri dikenal sebagai bangsa yang berani yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan kegigihannya dalam melawan pihak-pihak asing terutama Turki Ottoman yang telah berabad-abad menguasai Serbia hingga berhasil merdeka pada tahun 1878 dibawah jamina Kongres Berlin I, selain itu dibuktikan kembali dengan adanya keterlibatan dalam beberapa peperangan besar seperti Perang Krim, Perang Balkan, Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan perang saudara ketika terjadi disintegrasi Yugoslavia. Adanya Yugoslavia sendiri berawal dari inisiatif bangsa Serbia yang memiliki gagasan untuk mempersatukan seluruh bangsa Slavia Selatan ke dalam kerajaan besar yang dipimpin Serbia. Gagasan tersebut merupakan salah satu cita-cita nasional Serbia yang disebut dengan gerakan “Serbia raya”. (Fitriyani Puji Raharjo, 2016)

Nama Kosovo berasal dari nama tempat di Serbia yang berarti "lapangan burung hitam." Setelah melayani sebagai pusat kekaisaran Serbia pada abad pertengahan, Kosovo diperintah oleh Kekaisaran Ottoman dari pertengahan abad ke-15 ke awal abad ke-20, masa ketika Islam semakin penting dan populasi penutur bahasa Albania di wilayah itu meningkat. Pada awal abad ke-20, Kosovo dimasukkan ke Serbia (bagian Yugoslavia). Kosovo sendiri berbatasan dengan Serbia, Montenegro, Albania, dan Republik Makedonia. Pada paruh kedua abad ini, sebagian besar etnis Muslim Albania kalah dengan jumlah orang-orang Serbia Ortodoks Timur di Kosovo, dan ketegangan antar etnis sering mengguncang provinsi.

Pada tahun 1998 pemberontakan separatistis yang dipimpin etnik Albania meningkat menjadi krisis internasional (konflik Kosovo), yang memuncak pada tahun 1999 dalam sebuah serangan udara terhadap Yugoslavia — pada saat itu sebuah paroki dari negara federal yang sebelumnya, yang hanya terdiri dari Serbia dan Montenegro — oleh NATO. Setelah pemulihan perdamaian, Kosovo dikelola oleh Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo. Selama periode ini — dalam perjalanan Yugoslavia mengubah namanya menjadi Serbia dan Montenegro (2003) dan kemudian dipisahkan menjadi negara-negara merdeka (2006) — Serbia terus mempertimbangkan Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Namun demikian, di bawah pengawasan PBB, Kosovo mengembangkan struktur negara merdeka, dan pada Februari 2008 secara resmi menyatakan kemerdekaan dari Serbia. Sebuah misi Uni Eropa yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan polisi, peradilan, dan bea cukai pada umumnya menggantikan kehadiran PBB akhir tahun itu. Pristina (bahasa Albania: Prishtinë; Serbian: Priština) adalah ibu kota dan kota terbesar. (Antonia Young)

Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Namun deklarasi ini ditentang oleh Serbia, walaupun ditentang oleh Serbia, Kosovo sendiri masih mendapatkan dukungan oleh Negara-negara lain. Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritasnya merupakan etnis Albania. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo memang menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus. (detiknews, 2008)

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia di Pristina. Deklarasi ini dibacakan oleh Perdana Menteri Kosovo yaitu Hashim Thaci pada sidang parlemen yang dihadiri oleh 109 anggota. Sebelumnya Kosovo adalah satu provinsi dibawah kekuasaan Serbia yang mayoritas penduduknya beretnis Albania. Pada September 1992

Kosovo pun sudah pernah menyatakan kemerdekaannya, namun hanya Albania saja yang mengakui kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan pada waktu itu tidak berarti apa-apa karena hanya dianggap sebagai bentuk pemberontakan biasa dan Kosovopun kemudian dilanda konflik etnis yang berkepanjangan serta perang melawan Serbia selama 3 tahun antara tahun 1996-1999. Akhirnya Kosovo berada di bawah pengawasan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Melalui Resolusi DK PBB No. 1244 dan Kosovo mendapatkan status provinsi otonom. (Sujadmiko, 2012, p. 183)

Pada saat Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada September 1992, Serbia melancarkan aksi militer untuk menumpas gerakan separatisme Kosovo, sampai kemudian NATO ikut campur tangan dan memaksa Serbia menarik pasukannya dari Kosovo pada tahun 1999. Setelah adanya masa transisi, akhirnya Kosovo menyatakan Independensi dari Republik Serbia pada Februari 2008, namun sampai saat ini Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. (Aldriansyah, 2017)

Dalam menempuh kemerdekaannya, Kosovo telah melampaui perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Kosovo sendiri berpenduduk sekitar 2,1 juta jiwa, terdiri dari 90% etnis Albania yang Muslim, 5,3 etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain. (Taufiq, 2008, p. 14)

Dengan adanya dukungan Amerika Serikat, Kosovo secara sepihak telah menyatakan merdeka dan sehari kemudian telah mendapatkan pengakuan dari Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, Italia, Perancis, Inggris, Austria, Albania, Turki, dan Afganistan. Sementara yang menentang atau menolak mengakui adalah Serbia, Rusia, Spanyol, Rumania, Slovakia, dan Cyprus, dll. Bahkan Serbia menarik seluruh diplomat dari Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo. (Sujadmiko, 2012, p. 179)

Ada beberapa rintangan yang dihadapi oleh Kosovo dalam mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu rintangan tersebut yaitu adanya penolakan kemerdekaan seperti halnya yang dilakukan oleh China, dimana China menentang kemerdekaan Kosovo dengan alasan China mengkhawatirkan deklarasi itu akan memicu keinginan negara bagian China yaitu Taiwan untuk merdeka. China telah memperingatkan Taiwan yang telah menyampaikan dukungannya kepada kemerdekaan Kosovo. "Semua orang tahu bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak berhak menyatakan pengakuan terhadap yang disebut kemerdekaan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Liu Jianchao. (Kompas.com, 2008)

Adanya krisis politik yang terjadi di Kosovo setelah mengalami kemerdekaan pun menjadi salah satu rintangan yang dihadapi oleh Kosovo. Meskipun mengalami beberapa rintangan dalam mendapatkan pengakuan internasional, Kosovo ternyata malah mendapatkan mayoritas pengakuan dari Negara Eropa itu sendiri. Negara yang mendukung diantaranya adalah Jerman, Perancis, Britania Raya, Italia, Kroasia, Belgia, Swis, Polandia, Belanda, Swedia, Austria, Islandia, Norwegia, Denmark, Malta, Ceko, Hongaria, Republik Irlandia, Finlandia, Bulgaria, Serbia, Luxemburg, Albania, Montenegro, Slovenia, Lituania, Turki, Latvia, Estonia, Portugal, Makedonia, dan Andorra. (Be In Kosovo)

Dengan adanya rintangan yang terjadi Kosovo melakukan strategi diplomasi kebudayaan yang mana strategi ini mampu membuat Negara mayoritas Eropa itu sendiri mendukung kemerdekaan Kosovo. Dalam melakukan strategi demi mendapatkan pengakuan internasional sebuah negara, strategi tersebut dijalankan melalui 2 cara yaitu dengan menggunakan *soft power* ataupun *hard power*. Hal yang dilakukan oleh Kosovo sendiri yaitu dengan menggunakan instrumen Diplomasi

Kebudayaan. Dimana Diplomasi Kebudayaan sendiri merupakan konsep dari *soft power* diplomacy.

Menurut Joseph Nye, Jr definisi dari Soft Diplomacy sendiri adalah kemampuan sebuah negara untuk mencapai atau memenuhi keinginannya melalui atraksi, kebudayaan, nilai, kebijakan luar negeri, dan lain-lain yang mana tidak berkaitan dengan unsur 'pemaksaan'. Pemaksaan disini lebih diartikan pada kekuatan militer, embargo, atau pun kecaman. Kemampuan ini juga bertujuan dalam mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam membentuk agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. (Poros Ilmu, 2015)

Sebuah negara dapat melakukan diplomasi dengan menggunakan 2 jalur yaitu *soft power* diplomacy dan *hard power* diplomacy. Kosovo melakukan strategi sehingga mendapatkan mayoritas pengakuan Eropa dengan menggunakan Diplomasi Kebudayaan, dimana diplomasi kebudayaan sendiri adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, atau pun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, atau pun militer. (Warsito & Kartikasari, 2007)

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu di pertanyakan **'Bagaimana Diplomasi Kebudayaan yang dijalankan oleh Kosovo sehingga mendapatkan mayoritas pengakuan internasional dari Eropa?'**

## B. Kerangka Teori

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dan memahami serta menganalisa permasalahan yang berlandaskan terori-teori hubungan internasional dari pakar yang kompeten yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti. hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional. Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu hubungan internasional, sehingga dalam hal ini penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam penyusunan penulisan ini. (Putra, 2016, pp. 10-11)

Secara Konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu Negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional. Diplomasi diartikan tidak sekedar sebagai perundingan, melainkan semua upaya hubungan luar negeri. Sedangkan definisi kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum yaitu segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan.

Maka diplomasi kebudayaan itu sendiri adalah satu-satunya jenis diplomasi yang dimiliki manusia. Sebab diplomasi apapun yang dilakukan manusia, baik itu diplomasi ekonomi, diplomasi militer, dan lain-lain termasuk sebagai hasil budaya. Bisa juga diartikan sebagai usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama. Tujuan dari

diplomasi kebudayaan sendiri adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat Negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu Negara tertentu) dengan masyarakat (Negara lain). (Warsito & Kartikasari, 2007, hal. 2-3)

Pada dasarnya, diplomasi kebudayaan sendiri adalah satu-satunya jenis diplomasi yang dimiliki manusia. Karena, diplomasi apapun yang dilakukan manusia baik itu diplomasi militer, ekonomi, dan lainnya semua merupakan hasil dari kebudayaan. Saat ini, penggunaan diplomasi kebudayaan sebagai sarana diplomasi semakin sering dilakukan oleh sebuah negara dan menjadi semakin penting. Karena, dilakukan dengan kondisi damai dan tanpa adanya unsur pemaksaan antar negara.

Kebudayaan sendiri bukan hanya dari segi kesenian atau pun adat istiadat saja, tetapi bisa dari segala bentuk hasil dan upaya manusia. Maka dari itu, bentuk dan sarana diplomasi itu sendiri bermacam-macam. Pada penulisan ini, sarana diplomasi kebudayaan yang digunakan yaitu melalui pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan, dan kesenian. (Wicaksana, 2011)

Sedangkan menurut Alfian dan Nazarudin: Diplomasi Kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam persaingan masyarakat secara internasional. Diplomasi Kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. (Leonardo, 2012)

Dalam melakukan strategi demi mendapatkan mayoritas pengakuan internasional sebuah negara, strategi tersebut dijalankan melalui 2 cara yaitu dengan menggunakan soft power ataupun hard power. Perbedaan antara *soft power*

dan *hard power* itu sendiri sangat terlihat nyata dimana ciri dalam *soft power* yaitu mempengaruhi dan dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan *hard power* itu sendiri bersifat memaksa atau memerintah dan dilakukan secara langsung. Instrumen yang digunakan *soft power* itu sendiri yaitu berupa nilai, institusi, kebudayaan, dan kebijakan. Sedangkan instrumen yang digunakan oleh *hard power* yaitu dengan kekuatan militer (*military forces*), uang, suap (*gratifikasi*), sanksi, ataupun bayaran. (Arafat, 2011, p. 11)

Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa Kosovo menggunakan instrumen diplomasi kebudayaan. Dimana diplomasi kebudayaan sendiri merupakan konsep dari *soft power diplomacy*. Salah satu tokoh yang terkenal dalam kemunculan ini adalah Joseph Nye, Jr (1990).

Menurut penjelasan Joseph Nye mengenai *soft power* dalam bukunya *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, yaitu sebagai kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi negara lain, yakni kemampuan memikat pihak lain untuk rela melakukan suatu hal yang kita inginkan tanpa perlu untuk memintanya. Menurut Nye *soft power* suatu negara terdapat dalam beberapa sumber yaitu melalui kebudayaan, nilai-nilai politik, kebijakan luar negeri, atraksi, dan lain-lain yang mana tidak berkaitan dengan unsur pemaksaan. Pemaksaan yang dimaksud yaitu lebih mengarah pada kekuatan militer, embargo, atau pun kecaman.

Menurut argumen Joseph Nye budaya merupakan salah satu elemen dari *soft power* yang mampu memberikan ketertarikan tersendiri bagi bangsa lain. Bentuk daya tarik yang sangat bersifat emosial dan psikologis ini menjadi modal besar bagi sebuah bangsa untuk dapat menjalin hubungan kerjasama lebih jauh dengan negara lain. Bahkan lebih dari itu, dengan adanya bentuk persuasi dari pendekatan budaya, dapat menjadi acuan dan sandaran keberlangsungan hubungan harmonis antar bangsa. (Arafat, 2011, hal. 12-13)



Sebuah negara dapat melakukan diplomasi dengan menggunakan 2 jalur yaitu soft power diplomacy dan hard power diplomacy. Kosovo melakukan strategi demi mendapatkan pengakuan Eropa dengan menggunakan Diplomasi Kebudayaan, dimana diplomasi kebudayaan sendiri adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, atau pun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, atau pun militer. (Warsito & Kartikasari, 2007, hal. 4)

Sarana yang digunakan dalam diplomasi kebudayaan meliputi segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya sarana diplomatic maupun militer.

Sasaran utama dalam diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik pada level nasional yaitu dari suatu masyarakat negara-bangsa tertentu maupun internasional, dengan harapan bahwa pendapat umum dapat mempengaruhi keputusan para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional. Berikut adalah skema pelaku dan sasaran diplomasi kebudayaan:

## Tabel 1 1 Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan

Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan



Sumber; Buku Diplomasi Kebudayaan

Pelaku-pelaku diplomasi kebudayaan dapat dibedakan dari pelaku diplomasi yang lain, karena mereka bukan saja dari pihak pemerintah/resmi namun juga dari non-pemerintah, bahkan perorangan. Sebab, sasaran diplomasi kebudayaan itu sendiri adalah seluruh masyarakat negara sasaran, bukan hanya sekedar pemerintahnya saja. Maka dari itu, setiap golongan yang mewakili kepentingan dari suatu negara-bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah, resmi maupun tidak resmi, yang melancarkan kegiatan diplomasi kebudayaan kepada warga lain.

Perbedaan antara tindakan diplomasi kebudayaan dengan diplomasi non-kebudayaan adalah ciri pelaku dan sasarannya. Diplomasi Kebudayaan sendiri dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dan sasaran utamanya adalah masyarakat suatu negara-bangsa (dan bukan semata-mata langsung terhadap pemerintahnya). Oleh karena itu, karakteristik konsep-konsep diplomasi kebudayaan amat didasarkan pada ciri-ciri pola komunikasinya dan bukan pada

bidang operasi atau bidang-bidang disiplin yang dilibatkannya. (Warsito & Kartikasari, 2007, hal. 5)

**Tabel 1 2 Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan**

Situasi	Bentuk	Tujuan	Sarana
Damai	-Eksibisi - Kompetisi - Pertukaran Misi - Negosiasi - Konferensi	- Pengakuan - Hegemoni - Persahabatan - Penyesuaian	- Pariwisata - Olahraga - Pendidikan - Perdagangan - Kesenian
Krisis	- Propaganda - Pertukaran Misi - Negosiasi	- Persuasi (bujuksm) - Penyesuaian - Pengakuan - Ancaman	- Politik - Mass media - Diplomatik - Misi tingkat tinggi - Opini publik
Konflik	- Teror - Penetrasi - Pertukaran Misi - Negosiasi	- Ancaman - Subversi - Persuasi - Pengakuan	- Opini publik - Perdagangan - Para Militer - Forum Resmi Pihak Ketiga
Perang	- Kompetisi - Teror - Penetrasi - Propaganda - Embargo - Boikot - Blokade	- Dominasi - Hegemoni - Ancaman - Subversi - Pengakuan - Penaklukan	- Militer - Para militer - Penyelundupan - Opini Publik - Perdagangan - Supply barang konsumtif (termasuk senjata)

Sumber; Buku Diplomasi Kebudayaan

Keterangan :

- Semakin negatif hubungan antara dua (atau lebih) negara bangsa, maka semakin banyak/intensif bentuk diplomasi kebudayaan yang dipakai.
- Dalam pengertian awam/konvensional, diplomasi kebudayaan dikenal hanya pada waktu damai saja.

Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.

Dari segi pola komunikasi yang seperti itu dapat dikemukakan beberapa jenis konsep diplomasi kebudayaan menurut tujuan, bentuk dan sarannya. Dalam segi bentuk yaitu: eksebisi, propaganda, kompetisi, penetrasi, negosiasi, pertukaran ahli/ studi, terorisme. Tujuan: pengakuan, penyesuaian, bujukan, ancaman, hegemoni, subervisi. Dalam hal sarana ada infrastruktur dan suprastruktur.

Dalam segi cara: langsung dan tak langsung. Sedangkan yang terakhir yaitu situasi : damai, krisis, konflik, dan perang. Bentuk diplomasi kebudayaan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Eksebisi, kompetisi, negosiasi, pertukaran ahli/studi, dan konferensi.

**Eksebisi** juga merupakan bentuk diplomasi kebudayaan yang paling konvensional mengingat bahwa gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka, yang berarti bahwa diplomasi modern secara konvensional menganut dasar eksebisionistik atau transparan. Eksebisionistik diartikan bahwa setiap bangsa dianggap memiliki keinginan, bahkan ini menjadi keharusan untuk selalu pamer tentang ‘keunggulan-keunggulan’ tertentu yang dimilikinya. Sehingga, pada gilirannya citra bangsa yang bersangkutan memperoleh kehormatan yang lebih tinggi. Transparan, dikarenakan kemajuan teknologi informasi yang ada mengakibatkan setiap fenomena yang terjadi dalam suatu Negara tertentu dapat saja diketahui oleh Negara lain.

**Kompetisi** diartikan secara umum sebagai pertandingan atau persaingan. Dalam hal ini, pertandingan yang dimaksud adalah pertandingan dalam arti positif seperti, olahraga, kontes kecantikan, atau kompetisi ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan persaingan lebih cenderung diartikan sebagai keadaan atau situasi krisis, konflik, dan darurat. Kompetisi baik sebagai pertandingan ataupun persaingan antar negara-bangsa, dianggap sebagai salah satu bentuk diplomasi kebudayaan, karena di dalamnya terlibat sistem nilai yang paling esensial dalam mengatur

kekuatan masing-masing negara yang bersangkutan dalam rangka mengungguli bangsa lain.

**Pertukaran misi atau ahli** merupakan bentuk dari diplomasi kebudayaan dan salah satu jenis hasil dari negosiasi. Dalam hal ini, pertukaran ahli mencakup masalah kerjasama pertukaran kebudayaan secara luas, seperti kerjasama dalam beasiswa antar negara, atau pertukaran ahli dalam bidang lainnya. Diplomasi kebudayaan yang seperti ini juga sering disebut sebagai pelaksanaan ahli teknologi. Memberi arti bahwa negara-negara yang bersangkutan mempunyai kepentingan timbal balik dalam aspek kebudayaan pada umumnya.

**Negosiasi** disini diartikan bukan sebagai apa yang dirundingkan (dinegosiasikan), melainkan juga cara-cara pelaksanaan negosiasi. Dalam percaturan politik internasional, tempat untuk dilakukannya negosiasi sangatlah penting untuk dibahas sebelum negosiasi itu dilakukan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lingkungan budaya tempat negosiasi tersebut dilakukan mau tak mau juga akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam negosiasi yang akan berjalan.

Lingkungan budaya tersebut adalah tingkat kesadaran yang ada pada politik masyarakat setempat, sistem pers/media massa, sistem keamanan dan pengamanan, maupun fasilitas-fasilitas akomodasi untuk melaksanakan negosiasi tersebut. Diplomasi kebudayaan dalam bentuk negosiasi mencerminkan keinginan dari negara-negara yang bersangkutan untuk memperkenalkan, mengakui, menghormati, dan menghargai kebudayaan masing-masing negara yang bersangkutan. Bisa dilaksanakan dalam bentuk pertukaran kebudayaan atau pertukaran ahli, ataupun bentuk kerjasama makro yang lain. Adanya negosiasi baik dalam teknis pelaksanaan maupun materi yang dinegosiasikan, merupakan cerminan adanya tingkat pengakuan yang positif bagi tuan rumah.

**Konferensi** sendiri merupakan salah satu bentuk diplomasi kebudayaan. Konferensi dilakukan untuk tercapainya suatu kepentingan antara negara yang menyelenggarakan dengan negara-negara peserta atau lainnya.

Dalam penulisan ini, tujuan yang dicari dalam melakukan strategi tersebut untuk mendapatkan mayoritas pengakuan internasional Eropa. Pengakuan ialah perbuatan politik dimana suatu Negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Kemudian dalam praktek Negara modern pengakuan bukan sekedar mengetahui (cognition), atau lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui. Sarana yang digunakan pun ada dalam bentuk olahraga, pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan kesenian. (Tulus Warsito, 2007, pp. 2-28)

Teori yang digunakan penulis yaitu menggunakan Teori Diplomasi Kebudayaan. Dimana sarana diplomasi yang digunakan yaitu olahraga, pariwisata, pendidikan, perdagangan, kesenian. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan mayoritas pengakuan internasional Eropa dengan situasi damai. Bentuk yang digunakannya yaitu eksibisi, kompetisi, negosiasi, pertukaran ahli/misi, dan konferensi.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas serta mempertimbangkan kerangka dasar teori yang digunakan, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sementara bahwa dalam situasi damai, Kosovo melakukan diplomasi kebudayaan dalam bentuk eksibisi, kompetisi, pertukaran misi, negosiasi, dan konferensi dengan menggunakan sarana pariwisata, pendidikan, perdagangan, kesenian, olahraga, dan lain-lain.

Dengan tujuan untuk mendapatkan mayoritas pengakuan Internasional Eropa.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Memahami strategi atau diplomasi budaya yang dilakukan oleh Kosovo untuk mendapatkan pengakuan internasional eropa.
2. Mengetahui konsep yang digunakan Kosovo dalam mendapatkan pengakuan internasional.
3. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Menyelesaikan studi Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian terkait '**Diplomasi Budaya Kosovo untuk mendapatkan pengakuan Internasional Eropa**' penulis menggunakan penelitian yang menggunakan studi literature. Penulis menggunakan metode yang bersifat eksplorasi deskriptif dimana penelitian ini yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti jurnal, Koran, situs internet, buku serta media lain yang terkait untuk mendukung penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 4 bab besar yang menjelaskan topik skripsi. Kemudian ada pula sub bab-sub bab agar lebih terperinci penjelasan dari bab besar sebelumnya. Hubungan antar bab didalam skripsi ini, ditulis

secara sistematis agar memudahkan pembaca untuk memahami isi skripsi, sebagaimana berikut :

**BAB I :** Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisi tentang penjelasan resistensi kemerdekaan Kosovo dari perjuangan masa lalu

**BAB III :** Berisi tentang strategi yang dilakukan Kosovo sehingga mendapatkan mayoritas pengakuan dari Internasional Eropa melalui diplomasi kebudayaan.

**BAB IV:** Berisi tentang kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab III sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.